



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sebagai syarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah secara periodik, yang memuat informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Dalam penyusunan laporan ini, kami berupaya menyajikan secara sistematis keterkaitan antara perencanaan kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai, serta sejauh mana strategi yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada masa yang akan datang, sehingga mampu memberikan hasil yang lebih optimal, efektif, dan efisien.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus mendorong peningkatan kinerja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Pasangkayu, Maret 2026

BUPATI PASANGKAYU

H. YAUMIL AMBO DJIWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Letak Wilayah Geografis

Kabupaten Pasangkayu merupakan wilayah administratif di bawah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 18,13 persen dari total wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Serupa dengan wilayah lain di Provinsi Sulawesi Barat, beberapa desa/kelurahan di Kabupaten Pasangkayu terletak di wilayah pantai. Dari total 12 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Duripoku dan Kecamatan Bulu Taba yang desa/kelurahannya tidak satupun berada di wilayah pantai. Sebaliknya, hanya Kecamatan Sarjo yang seluruh desanya terletak di wilayah pantai. Perbedaan kondisi geografis ini memberikan keuntungan terhadap masyarakat Kabupaten Pasangkayu karena masing-masing wilayah dapat melakukan spesialisasi pada sektor tertentu agar seluruh kecamatan dapat berkembang secara merata. Kecamatan dengan wilayah yang seluruhnya bukan pantai dapat unggul dalam sektor pertanian ataupun perkebunan. Sedangkan, kecamatan dengan wilayah pantai dapat menonjolkan sektor perikanan.

Kecamatan	Jumlah Desa	Letak Desa	
		Pantai	Bukan Pantai
Sarudu	5	2	3
Dapurang	5	1	4
Duripoku	4	-	4
Baras	6	3	3
Bulu Taba	7	-	7
Lariang	7	2	5
Pasangkayu	6	3	3
Tikke Raya	5	4	1
Pedongga	4	1	3
Bambalamotu	6	4	2
Bambaira	4	3	1
Sarjo	4	4	-

B. Luas Wilayah

Kabupaten Pasangkayu memiliki wilayah seluas 3.043,75 Km². Secara administratif terdiri dari 12 (dua belas) wilayah Kecamatan, 4 (empat) Kelurahan dan 59 (lima puluh sembilan) Desa.

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase	Jumlah Desa/UKT Total	Jumlah Kelurahan Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sarudu	99,06	3,19	5	-
Dapurang	921,95	30,56	5	-
Duripoku	215,45	7,14	4	-
Baras	277,87	9,04	5	1
Bulu Taba	428,62	14,21	7	-
Lariang	83,34	2,68	7	-
Pasangkayu	312,04	10,21	4	2
Tikke Raya	266,59	8,63	5	-
Pedongga	94,00	3,03	4	-
Bambalamoto	242,96	8,00	5	1
Bambaira	64,84	2,11	4	-
Sarjo	37,03	1,20	4	-
Jumlah/Total	3043,75	100,00	59	4

C. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi wilayah, Kabupaten Pasangkayu memiliki karakteristik bentang lahan yang sangat beragam. Secara umum ketinggian wilayah ini berada pada 4-38 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kelerengan dengan kategori terjal (41-60 %) dan sangat terjal (> 60%) menempati areal terluas dan lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Pasangkayu, sedangkan lahan yang tergolong datar (< 2 %) dan landai berombak (2-8 %) mencapai 36 persen dari luas wilayah. Topografi wilayah dengan kategori bergelombang, berbukit dan agak terjal hanya mencapai 9 % dari luas wilayah Kabupaten Pasangkayu. Kelerengan lahan merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan. Kecamatan Pasangkayu merupakan daerah dengan ketinggian terendah yaitu 4 mdpl, sementara Kecamatan Bulu Taba menjadi daerah dengan wilayah tertinggi di atas permukaan laut (38 mdpl).

D. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2024-2025 (%)
BAMBALAMOTU	21,048	1.2
PASANGKAYU	34,503	0.1
BARAS	21,198	0.2
SARUDU	16,409	0.7
DAPURANG	17,067	0.5
DURIPOKU	6,441	0.1
BULU TABA	12,146	0.4
TIKKE RAYA	18,474	1.1
PEDONGGA	8,755	0.7
BAMBAIRA	11,227	0.7
SARJO	8,860	0.7
LARIANG	8,243	0.2
Kab. Pasangkayu	184,371	0.5

E. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Pasangkayu terbagi atas 4 wilayah pertumbuhan yaitu Sadadu (Sarjo/Dapurang/Duripoku), Babula (Baras/Bulutaba/Lariang), Papeti (Pasangkayu/Pedongga/Tikke Raya) dan Bambarasa (Bambalamotu/Bambaira/Sarjo).

F. Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2025 sebagai berikut:

TOTAL ASN

3,803

KEPEGAWAIAN

PNS	2,910
PPPK 2025	412
PPPK 2022	139
PPPK 2023	81
PPPK 2024	261
TOTAL	3,803

JENIS KELAMIN

Laki-Laki	1,570
Perempuan	2,233
TOTAL	3,803

JABATAN

Jabatan Struktural	405
Jabatan Fungsional Tertentu	2,185
Jabatan Fungsional Umum	1,213
TOTAL	3,803

FUNGSIONAL TERTENTU

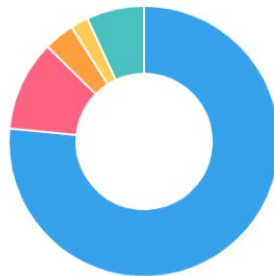
JFT Teknis	222
JFT Auditor	22
JFT Kesehatan	599
JFT Guru	1,342
TOTAL	2,185

ESELON

II.a	1
II.b	37
III.a	62
IV.a	165
III.b	94
IV.b	46
TOTAL	405

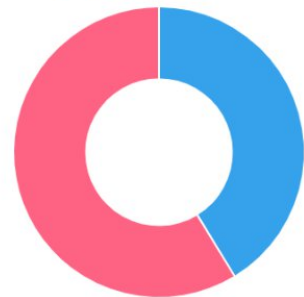
KEPEGAWAIAN

PNS PPPK 2025 PPPK 2022
PPPK 2023 PPPK 2024



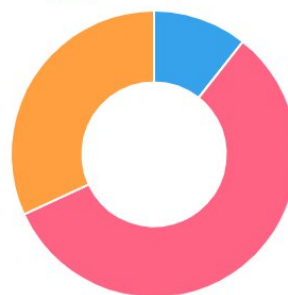
JENIS KELAMIN

Laki-Laki Perempuan



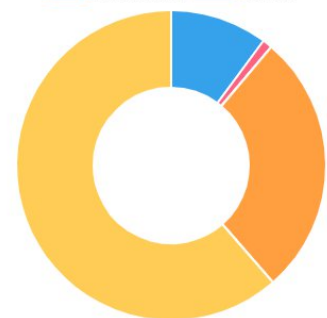
JABATAN

Jabatan Struktural
Jabatan Fungsional Tertentu
Jabatan Fungsional Umum



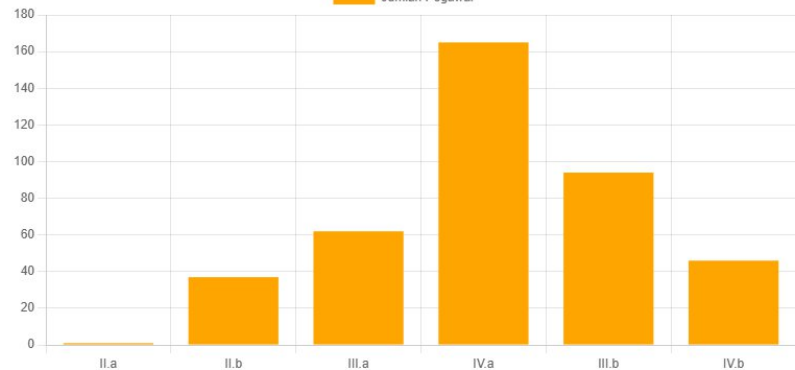
FUNGSIONAL TERTENTU

JFT Teknis JFT Auditor
JFT Kesehatan JFT Guru



ESELON

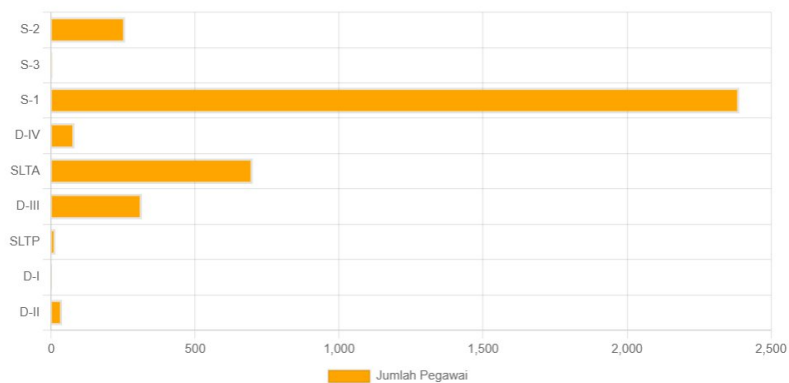
Jumlah Pegawai



PENDIDIKAN

S-2	257
S-3	4
S-1	2,390
D-IV	81
SLTA	700
D-III	315
SLTP	15
D-I	3
D-II	38
TOTAL	3,803

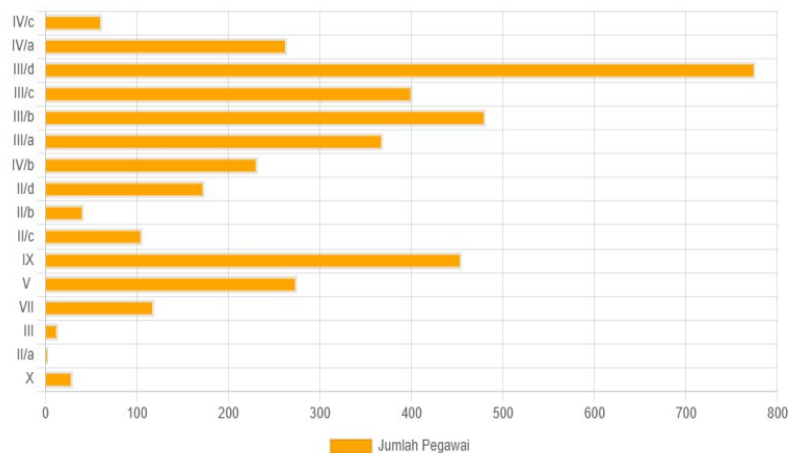
TINGKAT PENDIDIKAN



GOLONGAN

IV/c	62
IV/a	264
III/d	776
III/c	401
III/b	481
III/a	369
IV/b	232
II/d	174
II/b	42
II/c	106
IX	455
V	275
VII	119
III	14
II/a	3
X	30
TOTAL	3,803

GOLONGAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen antara Bupati Pasangkayu dengan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, sebagai bagian dari pencapaian target jangka menengah daerah.

Perjanjian kinerja ini menjadi dasar dalam pengukuran keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pembangunan daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia

- Indeks Pendidikan: 72,8
- Indeks Kesehatan: 63,16
- Indeks Paritas Daya Beli: 75,59

2. Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah

- Pendapatan Perkapita: 68,84
- Pertumbuhan Ekonomi: 7,53%
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 2,37%
- Pengeluaran Perkapita/Bulan: Rp1.272.175

3. Mewujudkan Pemerataan Pendapatan

- Indeks Gini: 0,306
- Tingkat Kemiskinan: 4,40%
- Indeks Infrastruktur: 76

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 71,67
- Indeks Kualitas Air: 69,32
- Indeks Kualitas Udara: 93,26

- Indeks Kualitas Lahan: 63

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

- Indeks Reformasi Birokrasi: 61

- Opini BPK: WTP

- Indeks Kepuasan Masyarakat: 87

C. Indikator Makro Pembangunan

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 72

Perencanaan kinerja ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan serta alat evaluasi untuk memastikan tercapainya target pembangunan daerah secara optimal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Capaian Kinerja

Kinerja Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasangkayu yang dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran kejelasan, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasangkayu berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode 2021-2026.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, indicator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja Kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarnya. Dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2025-2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahun dalam kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2029 dalam mewujudkan visi misi bupati yang ke-4 yaitu Mewujudkan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan yang dapat dicapai melalui Indeks Kinerja Utama yang terdiri dari 3 Indikator Utama Yaitu :

1) Indeks Kinerja Utama : Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas air pada badan air di wilayah Kabupaten Pasangkayu berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Indikator ini menggambarkan kondisi mutu air serta efektivitas upaya

pengendalian pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati Pasangkayu, khususnya dalam mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan,

2) Indeks Kualitas Udara

Merupakan indikator yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di suatu wilayah berdasarkan nilai komposit dari parameter pencemar udara tertentu dalam periode waktu tertentu. Indikator ini digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu untuk menilai tingkat keberhasilan pengendalian pencemaran udara serta sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasangkayu.

3) Indeks Kualitas Lahan

Peningkatan Indeks Kualitas Lahan menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian Misi keempat Bupati Pasangkayu yaitu mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan, melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, sehingga tercipta kualitas ruang yang aman, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat . Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . Capaian Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025

N o	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Targe t	Realisas i	Ket
<i>1.</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Membaiknya	Meningkatkan	61 %	70,68 %	Realisa

	Kualitas Air	konservasi sumber daya air, evaluasi kualitas air baku dan air bersih, penerapan System monitoring dini kualitas air, serta teknologi penerapan air baku.			si melebihi dari target yang ditetapkan sekitar 9,68 %
2.	MembaiKnya Kualitas Udara	Meningkatkan konservasi sumber daya hutan, pengendalian terhadap sumber penghasil polutan, serta penghijauan pada sarana dan prasarana publik	93,26 %	88,14 %	Belum Mencapai target yang telah ditetapkan sekitar 5,12 %
3.	MembaiKnya Kualitas Lahan	Meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penguangan laju deforestasi, dan	69,32 %	83,34	Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan

		pengintegrasian kebijakan			kan sekitar 14 %
--	--	---------------------------	--	--	------------------

Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi dimasa yang akan datang. Pengukuran Kinerja secara teknis dapat digunakan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator – indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut.

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu dengan capaian kinerja tahun lalu (Tahun 2024) dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel Perbandingan Realisasi
Target Kinerja Tahun 2024 dan 2025**

N o	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1.	2	3	4	5
1.	Membaiknya Kualitas Air	Meningkatkan konservasi sumber daya air, evaluasi kualitas air baku dan air bersih,	59,68 %	70,68 %

		penerapanSystem monitoring dini kualitaair, serta teknologi penerapan air baku.		
2.	Membaiknya Kualitas Udara	Meningkatkan konserva si sumber daya hutan, pengend alian terhadap sumber penghasil polutan, serta penghija uan pada sarana dan prasarana publik	93,26 %	88,14 %
3.	Membaiknya Kualitas Lahan	Meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan,rehabil itasi hutan dan lahan ,pengurangan laju deforestasi, dan pengintegrasian kebijakan	67,33 %	83,34

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2025	Targert Renstra	Ket
1.	2	3	4	5	
1.	Membaiknya	Meningkatkan	70,68 %	50,5 %	Realisasi Melebihi

	Kualitas Air	konservasi sumber daya air, evaluasi kualitas air baku dan air bersih, penerapan System monitoring dini kualitaair, serta teknologi penerapan air baku.			dari target Renstra sebesar 20,18 %
2.	Membaiknya Kualitas Udara	Meningkatkan konservasi sumber daya hutan, pengendalian terhadap sumber penghasil polutan, serta penghijauan pada sarana dan prasarana public	88,14 %	92,8 %	Realisasi tidak memenuhi hidari target Renstra sebesar 4,66 %
3.	Membaiknya Kualitas Lahan	Meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan ,pengu rangan laju deforestasi, dan pengintegrasian	83,34 %	70,87	Realisasi Melebihi dari target Renstra sebesar 12,47 %

3. P

		kebijakan			
--	--	-----------	--	--	--

erbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi dalam hal ini Renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan target Renstra yang telah ditetapkan gambaran perbandingan dapat dilihat pada table berikut :

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan dan solusi Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dijelaskan berdasarkan target dan capaian Hidup sebagai berikut :
- a. Sasaran Pertama Membaiknya Kualitas Air

Tabel .Realisasi Indikator Kinerja Membaiknya Kualitas Air

N o	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Targe t thn 2025	Rea lisas i Thn 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Membaikn ya Kualitas Air	Meningkatkan konservasi sumber daya air, evaluasi kualitas air baku dan air bersih, penerapan sistem monitoring dini kualitas air, serta teknologi penerapan air baku.	61 %	70,68%	Mele bihi Targ et 9,68 persen

Dari Tabel diatas pada sasaran pertama menunjukan bahwa realisasi

pelaksanaan kerja terkait sasaran membaiknya kualitas Air melebihi target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengujian kualitas air di beberapa titik pantau yang dilakukan pengujian oleh tim ahli dan diuji dilaboratorium yang terakreditasi dari hasil uji lab menunjukkan adanya peningkatan indeks kualitas Air di Kab. Pasangkayu sebanyak 9,28 persen dari target tahun 2025 dan indeks kualiatas air kab. Pasangkayu peringkat provinsi 5 dari 6 Kabupaten sedangkan peringkat nasional 286 dari 514 dari Kabupaten/Kota. Tingkat keberhasilan ini disebabkan karena :

- Meningkatnya komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air
- Meningkatnya peran pelaku usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemaran
- Pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap pencemaran lingkungan semakin intensif dilaksanakan

b. Sasaran Kedua Membaiknya Kualitas Udara

Tabel .Realisasi Indikator Kinerja Menbaiknya Kualitas udara

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target thn 2025	Realisasi Thn 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Membaiknya Kualitas Udara	Meningkatkan konservasi sumber daya hutan, pengendalian terhadap sumber penghasil	93,26 %	88,14 %	Belum mencapai Target

		polutan, serta penghijauan pada sarana dan prasarana publik.			senilai 5,12 persen
--	--	---	--	--	---------------------------

Pada Sasaran Kedua membaiknya kualitas udara berdasarkan tabel capaian dan target diatas menunjukkan realisasi belum mencapai target senilai 5,15 yang ditetapkan pada tahun 2025 dimana parameter pengukuran berdasarkan indeks kualitas udara yang ada di Pasangkayu bekerjasama dengan kementerian lingkungan hidup dengan menggunakan alat (PASSIVE SAMPLER) dalam pengujian kualitas udara yang ada di kabupaten pasangkayu dari hasil pengujian tersebut pada tingkat provinsi menduduki peringkat 1 dari 6 kabupaten/kota sedangkan di tingkat nasional menduduki peringkat 66 dari 514 kabupaten/kota. Belum tercapainya target indeks kualitas udara di Kabupaten Pasangkayu adanya penurunan dari target disebabkan oleh karena :

- Meningkatnya aktivitas transportasi, kegiatan industri dan konstruksi.
- Keterbatasan upaya pengendalian pencemaran udara serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang ramah udara bersih turut berkontribusi terhadap belum optimalnya capaian indeks kualitas udara
- potensi pembakaran lahan atau sampah yang masih terjadi di beberapa wilayah.
- kondisi cuaca dan faktor meteorologi seperti kecepatan angin, suhu udara, dan curah hujan juga turut mempengaruhi konsentrasi polutan di udara.

Oleh karena itu perlu upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi

terhadap belum optimalnya capaian indeks kualitas udara :

- Peningkatan pengawasan, pengendalian sumber pencemar udara.
- Penguatan peran masyarakat dalam menjaga kualitas udara guna mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan.
- Tersedianya anggaran pengelolaan lingkungan hidup untuk aspek pengendalian pencemaran
- Adanya pemantauan dan pengendalian terhadap pencemaran
- Pelibatan pemangku kepentingan (sektor swasta dan masyarakat) dalam pengendalian pencemaran lingkungan

c. Sasaran Ketiga Membaiknya Kualitas Lahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target thn 2025	Realisasi Thn 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Membaiknya Kualitas Lahan	Meningkatkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengurangan laju deforestasi, dan pengintegrasian kebijakan Tata Ruang	83,34 %	70,87	Realisasi Melebihi dari target Renstra sebesar 12,47 %

Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Pasangkayu pada tahun berjalan menunjukkan capaian yang baik dengan peningkatan sebesar 12,47 persen dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut,

Kabupaten Pasangkayu menempati peringkat ke-3 dari 6 kabupaten di tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Sementara pada tingkat nasional, Kabupaten Pasangkayu berada pada peringkat ke-62 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Posisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas lahan di Kabupaten Pasangkayu berada pada kategori cukup baik dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan melalui berbagai program pengendalian kerusakan lahan, rehabilitasi lahan kritis, dan penguatan pengawasan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh :

- berbagai upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

5. Analisis Terhadap efisiensi Sumber Daya

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan anggaran yang tersedia telah diarahkan secara optimal pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama, seperti peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pelaksanaan program tetap dapat berjalan secara efektif melalui penentuan prioritas kegiatan yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan anggaran yang tersedia telah diarahkan secara optimal pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama, seperti peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pelaksanaan program tetap dapat berjalan secara efektif melalui penentuan prioritas kegiatan yang berdampak langsung terhadap kualitas lingkungan.

7. Realisasi Anggaran

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program-program dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan.

Pada Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Retribusi Sampah	Rp. 669.226.000,-
2. Belanja Langsung	Rp. 1.984.405.647,-
3. Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.066.063.756,-
4. Sisa Pagu	Rp. <u>159.539.106,-</u>
	Rp. 7.210.008.509,-

Berdasarkan matriks evaluasi hasil Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, diperoleh data dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 yang dikelompokkan berdasarkan program sebagai berikut :

Tabel 1.

Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2025 Berdasarkan Pengelompokan Program

No	Nama Program	Pagu	Realisasi Anggaran RENJA		Rata-rata Capaian Kegiatan RENJA			
					Kinerja (%)		Predikat Kinerja	
		Rp.	Rp.	%	K	Rp.	K	Rp
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	'PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.542.271.209	2.465.413.873	96,97	100	96,98	ST	ST
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN	649.980.400	578.172.000	88.95	100	89	ST	ST
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.017.756.900	4.006.883.530	99.72	100	99,73	ST	ST
J U M L A H		7.210.008.509	7.050.469.40	97,7				

No	Nama Program	Pagu	Realisasi Anggaran RENJA		Rata-rata Capaian Kegiatan RENJA			
					Kinerja (%)		Predikat Kinerja	
		Rp.	Rp.	%	K	Rp.	K	Rp
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3	8				
R A T A - R A T A CAPAIAN KINERJA					100	95,21	Sang at Tingg i	Sang at Tingg gi

Sumber data : Subag. Prog & Keu, DLH, Desember 2025).

Keterangan:

Kolom (1) Nomor Urut Program

Kolom (2) adalah Pagu anggaran berdasarkan program

Kolom (3) adalah nama Program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu.

Kolom (4) adalah realisasi anggaran Program pada Rencana Kerja.

Kolom (5) adalah persentase realisasi anggaran program (realisasi/pagu x 100)

Kolom (6) adalah rata-rata capaian kinerja kegiatan berdasarkan program yang ada

Kolom (7) adalah rata-rata realisasi anggaran kegiatan berdasarkan program yang ada.

Kolom (8) adalah predikat untuk pencapaian kinerja sesuai dengan rata-rata capaian kinerja pada kolom 6.

Kolom (9) adalah predikat untuk pencapaian anggaran sesuai dengan rata-rata realisasi anggaran pada kolom 7.

ST = Sangat Tinggi ($91,00\% \leq 100\%$)

T = Tinggi ($76,00\% \leq 90,99\%$)

S = Sedang ($66,00\% \leq 75,99\%$)

R = Rendah ($51,00\% \leq 65,99\%$)

SR = Sangat Rendah ($\leq 50,99\%$)

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas diperoleh gambaran kinerja SKPD antara lain sebagai berikut :

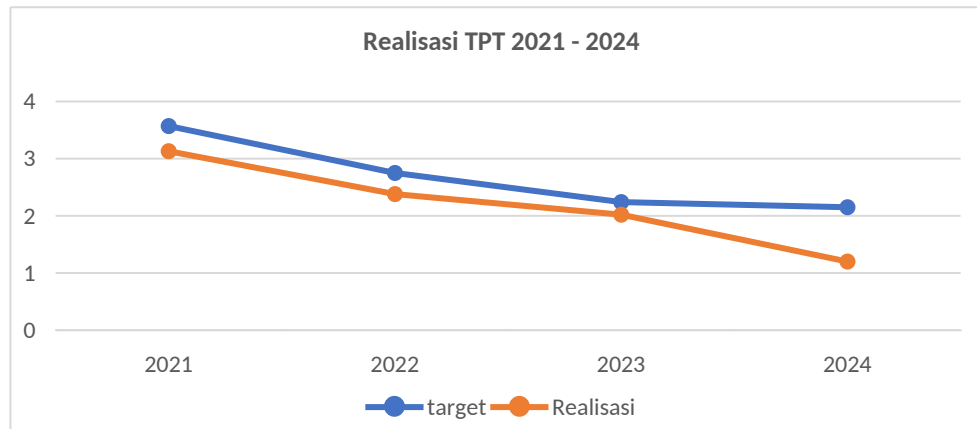
1. Total realisasi anggaran Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.**7.050.469.403,-** (Tujuh Milyar Lima Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah) atau **97,78 %** dari total pagu anggaran.
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan berdasarkan program sampai Triwulan IV adalah sebesar **100 %** dengan predikat kinerja “SANGAT TINGGI”
3. Rata-rata capaian kinerja keuangan berdasarkan program sampai triwulan IV adalah sebesar **95,21 %** dengan predikat kinerja “SANGAT TINGGI”.

Rincian capaian kinerja masing-masing Program dan Kegiatan

B. Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka

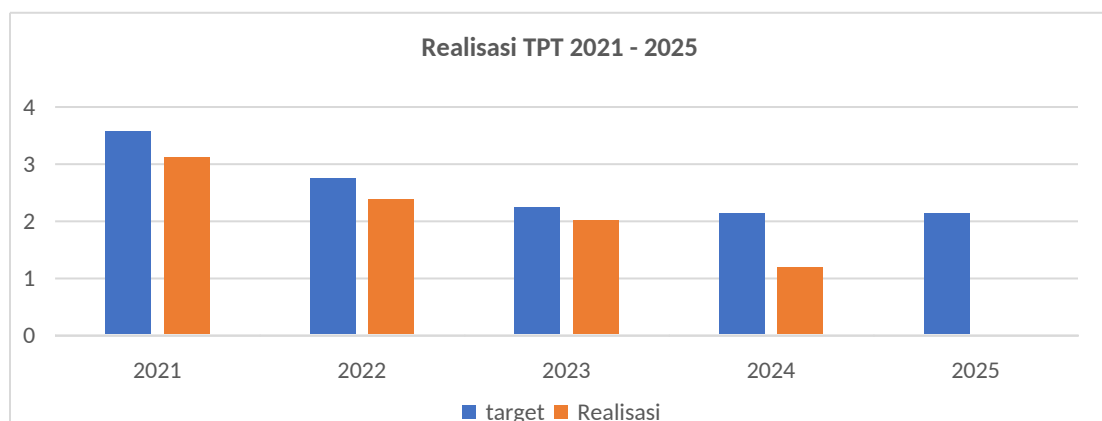
Tingkat Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan kondisi persentase penduduk yang masuk kategori angkatan kerja namun tidak bekerja (mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha). TPT mengindikasikan besarnya persentase penduduk yang menganggur yang masuk kategori angkatan kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka = jumlah pengangguran : jumlah angkatan kerja



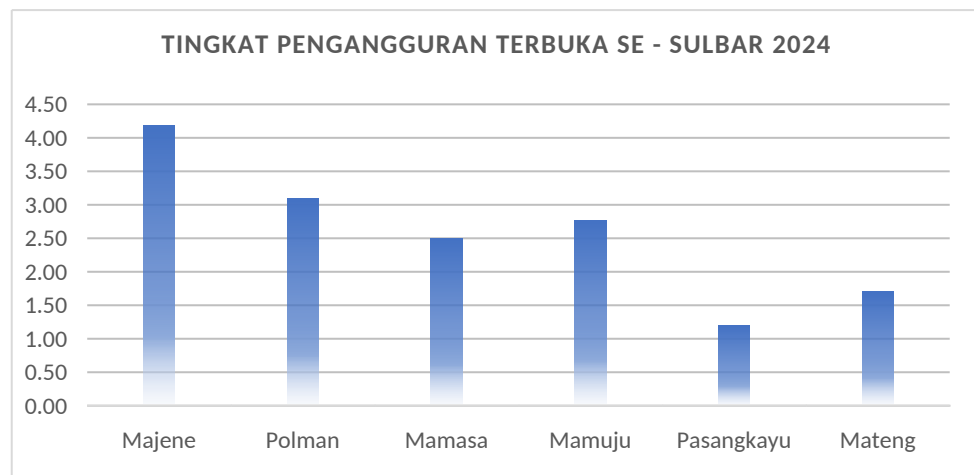
Dari Gambar diatas menggambarkan nilai TPT di Kabupaten Pasangkayu dari tahun 2021 sampai 2024 selalu mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 TPT Kabupaten Pasangkayu bernilai sebesar 1,20 persen. Artinya terdapat sekitar 1 orang dari 100 penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja (mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa TPT Kabupaten Pasangkayu memiliki nilai yang relatif rendah, sehingga mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang dapat terserap dengan baik di pasar tenaga kerja.

Kondisi awal Tingkat Pengangguran terbuka pada wal periode Renstra 2025 – 2029 yaitu Tahun 2024 yaitu 1.20 Persen dan diharapkan pada akhir periode yaitu tahun 2030 akan terus menurun diangka 1 Persen. Pada Tahun 2025 dinas tenaga kerja Perindustrian dan transmigrasi menetapkan target Tingkat pengangguran terbuka sebesar 1.16 Persen. Realisasi Kinerja atas Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2021 s/d 2025



Capaian Realisasi atas Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 merupakan capaian realisasi yang paling rendah selama tiga Tahun terakhir dari Tahun 2021 s/d 2023. Realisasi Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sebesar 1.20 Persen, TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara pengangguran terbuka dengan Angkatan kerja dalam satuan persen. Semakin tinggi nilai TPT menjelaskan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar tenaga kerja.

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 sebesar 1.20 Persen yang artinya terdapat sekitar 1 orang dari 100 penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja (mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa TPT Kabupaten Pasangkayu memiliki nilai yang relatif rendah, sehingga mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang dapat terserap dengan baik di pasar tenaga kerja.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Kabupaten Majene memiliki TPT tertinggi yaitu sebesar 4,19 persen, sedangkan Kabupaten Pasangkayu merupakan kabupaten dengan TPT terendah yaitu sebesar 1,20 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa

angkatan kerja di Kabupaten dapat terserap dengan baik di pasar tenaga kerja jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

C. INDIKATOR KINERJA INDEKS RASIO GINI

Untuk menghitung Indeks Gini atau Gini Ratio secara manual cukup kompleks karena melibatkan distribusi kumulatif dari pendapatan atau pengeluaran penduduk. Di Indonesia, BPS biasanya menghitung Indeks Gini berdasarkan data pengeluaran per kapita dari survei SUSENAS.

1. Rumus Indeks Gini (Metode Penjumlahan Trapezoid)

Dalam praktiknya, untuk data yang sudah dikelompokkan ke dalam interval, rumus yang sering digunakan adalah:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$$

Keterangan:

- G : Koefisien Gini.
- X_i : Kumulatif proporsi populasi pada kelas ke- i .
- Y_i : Kumulatif proporsi pendapatan/pengeluaran pada kelas ke- i .
- n : Jumlah kelompok/interval penduduk.

2. Langkah-Langkah Penghitungan Manual (Sederhana)

Jika Anda ingin mensimulasikan penghitungan di tingkat kabupaten:

- Urutkan Data: Urutkan seluruh penduduk (atau sampel penduduk) dari yang memiliki pengeluaran paling rendah ke yang paling tinggi.
- Bagi Kelompok: Bagi penduduk tersebut ke dalam kelompok (misalnya 5 kelompok/kuintil, di mana masing-masing berisi 20% penduduk).
- Hitung Total Pendapatan: Hitung total pengeluaran/pendapatan dari masing-masing kelompok tersebut.
- Buat Persentase Kumulatif:
 - Kelompok 1 (20% penduduk termiskin) menguasai berapa % pendapatan?
 - Kelompok 1 + 2 (40% penduduk) menguasai berapa % pendapatan? (dan seterusnya).

3. Nilai Ambang Batas Indeks Gini

Dalam LAKIP, Anda harus mampu menginterpretasikan angka yang muncul:

- $< 0,3$: Ketimpangan Rendah (Distribusi pendapatan cukup merata).
- $0,3 - 0,5$: Ketimpangan Sedang.
- $> 0,5$: Ketimpangan Tinggi (Hanya segelintir orang yang menguasai ekonomi daerah).

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Berdasarkan Data Badan Statistik Nilai IPM Kabupaten Pasangkayu Terjadi Kenaikan dari Tahun Sebelumnya 2024 Dengan Nilai 71,04% Meningkat Pada Tahun 2025 Dengan Nilai 71,62% Dimana Faktor Peningkatan Tersebut dapat dilihat pada Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dari Tahun 2024 Dengan Nilai 8,13% Menjadi 8,14% Di Tahun 2025, Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di tahun 2024 dengan nilai 12,09% terjadi kenaikan 12,10% pada tahun 2025 Serta meningkatnya rehabilitasi sarana dan prasarana satuan pendidikan ditahun 2025 baik rehabilitasi RKB, perpustakaan dan Utilitas satuan pendidikan.

Beberapa faktor pendukung Meningkatnya angka harapan lama sekolah yakni program bantuan pendidikan baik pusat maupun daerah seperti halnya kartu indonesia pintar (KIP) program pusat , retrieval dan transisi (program kabupaten), pemerataan infrastruktur pembangunan sekolah didaerah terpencil baik berupa fasilitas sekolah, penyediaan ruang kelas baru mempermudah akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

Kebijakan pemerintah terkait wajib belajar 9 tahun dengan sistem pemerataan berbasis zonasi dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) memastikan anak-anak terdaftar di satuan pendidikan terdekat, meningkatnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan yang mengurangi angka putus sekolah akibat biaya.

Peningkatan kualitas pendidik dan kompetensi pendidik yang lebih baik disekolah yang membuat pengalaman menjadi lebih baik dan mendorong berkelanjutan sekolah, pemanfaatan e-learning teknologi dalam pembelajaran khususnya pasca pandemi membantu menjaga kontinuitas pendidikan meningkatkan partisipasi sekolah.

Beberapa faktor pendukung Meningkatnya rata-rata lama sekolah melalui perbaikan sarana pendidikan baik pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas yang ada disekolah, perluasan program bantuan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta program pendidikan kesetaraan untuk mencegah putus sekolah. Adanya bantuan operasional sekolah, bantuan pendidikan yang mengurangi beban biaya sekolah serta peningkatan kualitas pendidikan baik guru yang telah melakukan pelatihan, sertifikasi dan program-program lainnya untuk berkelanjutan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang ada dilingkungan sekolah lebih berpihak ke siswa yang lebih kondusif untuk memotivasi siswa dalam belajar sehingga mengurangi angka putus sekolah sehingga peningkatan keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

E. INDEKS PENDIDIKAN

Indeks pendidikan adalah suatu komponen dari indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan diukur dengan menggabungkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, Pengukuran indeks pendidikan dilakukan berdasarkan tingkat melek huruf.

Nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Pasangkayu Terjadi Kenaikan dari Tahun Sebelumnya 2024 Dengan Nilai 60,59% Meningkat Pada Tahun 2025 Dengan Nilai 62,19% Dimana Faktor Peningkatan Tersebut dapat dilihat pada Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dari Tahun 2024 Dengan Nilai 8,13% Menjadi 8,14% Di Tahun 2025 yang diharapkan akan dirasakan oleh anak-anak pada umur tertentu di masa mendatang, Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah

(RLS) di tahun 2024 dengan nilai 12,09% terjadi kenaikan 12,10% pada tahun 2025 yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas untuk menempuh pendidikan formal.

Faktor penentu dalam indeks pendidikan yakni kualitas pengajar kompetensi guru serta metode pembelajaran, kelengkapan fasilitas sekolah sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi, pendapatan rumah tangga dengan tingkat kemiskinan mempengaruhi kemampuan akses pendidikan sehingga masyarakat dapat termotivasi baik minat belajar siswa melalui dorongan orang tua sehingga tidak terjadi putus sekolah.

Peningkatan rapor mutu pendidikan adalah salah satu faktor dalam mendukung indeks pendidikan yang di mana data rapor mutu pendidikan kabupaten Pasangkayu ini merupakan sumber dari rapor mutu pendidikan pada satuan pendidikan dimana mencakup Angka Partisipasi Sekolah (APK) , Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian rapor mutu pendidikan kabupaten pasangkayu dilakukan dengan memanfaatkan rapor pendidikan tahun 2025 sebagai instrumen untuk melihat capaian kinerja pendidikan secara komprehensif pada jenjang PAUD, SD, dan SMP. Rapor pendidikan memberikan gambaran kondisi mutu pendidikan berdasarkan empat dimensi utama yaitu hasil belajar, proses pembelajaran, mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola satuan pendidikan dimana angka partisipasi kasar (APK PAUD Mencapai 90%) Untuk jenjang SD 72% dan jenjang SMP 74%.

F. INDEKS KESEHATAN

1. Sasaran indikator Dinas kesehatan tahun 2025

Pengukuran Indeks Kesehatan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Indeks ini merupakan indikator makro yang mencerminkan kondisi kesehatan penduduk secara umum, dimensi kesehatan dihitung berdasarkan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yang juga menjadi komponen utama dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dasar pengukuran Indeks Kesehatan dihitung melalui proses normalisasi angka UHH menggunakan batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan secara nasional. Standar yang digunakan: UHH minimum = 20 tahun, UHH maksimum = 85 tahun, Indeks Kesehatan dihitung berdasarkan normalisasi Umur Harapan Hidup (UHH) dengan rumus pengukuran sebagai berikut

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{UHH - 20}{85 - 20}$$

Keterangan:

UHH minimum = 20 tahun UHH maksimum = 85 tahun

Adapun langkah-langkah pengukuran Indeks Kesehatan adalah Mengumpulkan data UHH terbaru dari BPS, Menghitung nilai indeks menggunakan rumus normalisasi, Membandingkan hasil dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Menghitung persentase capaian kinerja.

Kinerja sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator usia indeks kesehatan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2023	2024	2025
1	Indeks Kesehatan	77,76	70	71,04	71,62

Pada Tahun 2025 realisasi indikator kinerja sasaran belum mencapai target yang telah ditetapkan . Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya optimal dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga Kesehatan
2. Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan dasar
3. Kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program promotif dan preventif
5. Efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan

Untuk meningkatkan capaian kinerja, akan dilakukan:

1. Penguatan monitoring dan evaluasi program secara berkala
2. Optimalisasi perencanaan berbasis data
3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
4. Penguatan koordinasi lintas sektor

Tabel 2. Target dan Realisasi Capain Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Capain Kinerja			Kode
			2023	2024	2025	
1	Indeks Kesehatan	77,76	89,01	90,86	91,35	Sangat memuaskan

Realisasi capaian Indeks Kesehatan sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Peningkatan Indeks Kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
3. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
4. Perbaikan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil
5. Penguatan program promotif dan preventif

Realisasi capaian kinerja Kesehatan Tahun 2025 sebesar 91,35 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 90,8 dan tahun 2023 sebesar 89,01. Tren peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatnya akses dan cakupan program kesehatan masyarakat. Ke depan, diperlukan upaya optimalisasi program prioritas agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

2. Analisa Indikator Sasaran

Indeks Kesehatan merupakan indikator Sasaran strategis yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan sektor kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini bersifat outcome, karena mencerminkan hasil akhir dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kesehatan.

Dalam sistem pengukuran pembangunan nasional, dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yang menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian,

peningkatan Indeks Kesehatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM daerah.

Indeks Kesehatan merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indeks ini digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan sektor kesehatan secara makro dan menjadi ukuran penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah, Analisis indikator sasaran dilakukan dengan melihat:

a. Tingkat Capaian

- 1) Apakah realisasi telah mencapai atau melampaui target.
- 2) Kategori capaian (Sangat Baik, Baik, Cukup, atau Kurang).

b. Tren Perkembangan

- 1) Perbandingan nilai indeks 3–5 tahun terakhir.
- 2) Apakah terjadi peningkatan, stagnasi, atau penurunan.

c. Kontribusi Program

- 1) Penurunan angka kematian bayi dan ibu
- 2) Percepatan penurunan stunting
- 3) Peningkatan cakupan imunisasi
- 4) Peningkatan akses pelayanan kesehatan
- 5) Ketersediaan tenaga kesehatan

Analisis terhadap Pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten pasangkayu Tahun 2025 beserta dengan penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja, adapun hasil dari penilaian kineja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Target dan Realisasi, Capain Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun			Capaian Kinerja		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Indeks Kesehatan	77,76	70	71,04	71,62	89,01	90,86	91,35

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Program Dinas Kesehatan merupakan instrumen utama dalam mendukung

pencapaian sasaran strategis, khususnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dalam Indeks Kesehatan. Setiap program dirancang dengan indikator program yang terukur sehingga dapat dievaluasi kontribusinya terhadap indikator sasaran.

a. Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak usia 0–59 bulan dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama, yang dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini menggambarkan derajat kesehatan anak serta kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu daerah. Angka kematian balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 adalah 1,6 per 1000 kelahiran hidup berdasarkan target tahun 2025 yaitu 10 per 1000 kelahiran hidup % dan capaian kinerja yaitu 16 persen. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa angka kematian bayi di kabupaten pasangkayu jauh dibawah target , Dengan capaian Angka Kematian Bayi yang berada di bawah target, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui Dinas Kesehatan telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak. Ke depan, upaya ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna menjaga tren positif dan memastikan keberlanjutan peningkatan derajat

kesehatan masyarakat.

Keberhasilan ini didukung oleh:

- 1) meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K1 dan K4)
 - 2) Tingginya persentase persalinan di fasilitas kesehatan
 - 3) Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap
 - 4) Penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal Peran aktif tenaga kesehatan dan kader di tingkat desa
- b. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi usia 0–11 bulan dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama, yang dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

Angka Kematian Bayi Tahun 2025 tercatat sebesar 17,94 per 1.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan target sebesar 18,6 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator berada pada kategori sangat baik. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas program kesehatan ibu dan anak, serta meningkatnya kualitas pelayanan neonatal dan persalinan di fasilitas kesehatan.

Adapun faktor pendorong yang mendukung tercapainya target Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain:

1. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Antenatal (K1 dan K4)
2. Persalinan di Fasilitas Kesehatan
3. Pelayanan Neonatal Esensial
4. Dukungan pemerintah daerah, kader kesehatan, serta partisipasi masyarakat memperkuat pelaksanaan program

kesehatan ibu dan anak.

5. Intervensi pencegahan stunting dan pemberian ASI eksklusif turut berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan dan kesehatan bayi.
 6. Sistem rujukan yang cepat dan terintegrasi memungkinkan penanganan kasus kegawatdaruratan neonatal secara tepat waktu.
 7. Imunisasi yang tinggi menurunkan risiko penyakit yang dapat menyebabkan kematian bayi.
 8. Pelaksanaan kunjungan neonatal (KN1, KN2, KN3) secara optimal membantu deteksi dini gangguan kesehatan bayi baru lahir.
- c. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan dalam waktu 42 hari setelah persalinan (masa nifas), yang disebabkan oleh faktor terkait kehamilan atau penanganannya, dalam satu tahun tertentu, dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama, dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup. AKI merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Angka Kematian Ibu Tahun 2025 tercatat sebesar 203,91 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan target sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian ini menunjukkan kinerja yang Melebihi target karena berada di atas target yang ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pelayanan kesehatan ibu, peningkatan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, serta optimalisasi sistem rujukan maternal.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, masih terdapat

beberapa kendala yang mempengaruhi upaya penurunan AKI, antara lain:

1. Jarak tempuh ke fasilitas kesehatan yang jauh
2. Terlambat mengambil keputusan untuk dirujuk
3. Distribusi tenaga kesehatan belum merata
4. Rendahnya kesadaran ibu hamil untuk pemeriksaan rutin
5. Kondisi ekonomi keluarga

Adapun faktor pendorong yang berkontribusi terhadap penurunan dan pencapaian target Angka Kematian Ibu (AKI) antara lain:

1. Pemeriksaan kehamilan secara rutin dan berkualitas memungkinkan deteksi dini faktor risiko serta penanganan komplikasi sejak awal.
2. Meningkatnya persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan menurunkan risiko kematian akibat komplikasi persalinan.
3. Penguatan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED) di Puskesmas serta pelayanan emergensi komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung capaian antara lain:

1. Penguatan Pelayanan Antenatal Berkualitas
2. Optimalisasi Pelayanan PONED dan PONEK
3. Penguatan Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal

4. Audit Maternal Perinatal (AMP)
 5. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan
 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Kader
 7. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
- d. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah kematian bayi usia 0–28 hari per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah.

Pada Tahun 2025, target Angka Kematian Neonatal (AKN) ditetapkan sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 14,27 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini menunjukkan kinerja yang Melebihi target karena berada di atas target yang ditetapkan. sehingga memerlukan evaluasi dan penguatan intervensi program.

Capaian Angka Kematian Neonatal (AKN) Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator masih memerlukan perhatian serius dan intervensi terintegrasi. Upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, penguatan sistem rujukan, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dini risiko kehamilan dan neonatal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian AKN antara lain:

1. Masih ditemukannya kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
2. Persalinan dengan komplikasi (asfiksia, prematuritas)
3. Rendahnya kesadaran ibu terhadap tanda bahaya

kehamilan dan neonatal Adapun faktor yang mendukung upaya penurunan AKN antara lain:

1. Peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
2. Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kunjungan neonatal
3. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
4. Dukungan program pemerintah pusat melalui SPM bidang kesehatan

Dalam rangka mendukung pencapaian target AKN, Dinas Kesehatan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil melalui peningkatan kualitas ANC terpadu.
2. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan neonatal esensial dan kegawatdaruratan neonatal.
3. Optimalisasi sistem rujukan maternal dan neonatal.
4. Peningkatan kunjungan neonatal lengkap (KN1, KN2, KN3).
5. Pelaksanaan audit maternal dan perinatal untuk setiap kasus kematian.
6. Edukasi masyarakat terkait tanda bahaya pada bayi baru lahir.

e. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup menggambarkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Semakin tinggi UHH, semakin baik kondisi kesehatan, gizi, sanitasi, dan pelayanan kesehatan suatu daerah.

Pada Tahun 2025, target Usia Harapan Hidup (UHH) ditetapkan sebesar 70,79 tahun, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 70,86 tahun. Berdasarkan hasil tersebut, capaian UHH mendekati Melebihi target yang ditetapkan

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan UHH antara lain:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar
2. Pelaksanaan program promotif dan preventif (Posyandu, skrining PTM)
3. Peningkatan cakupan imunisasi dan pelayanan kesehatan ibu dan anak
4. Peningkatan kepesertaan JKN
5. Perbaikan sarana dan prasarana

fasilitas kesehatan Adapun faktor yang masih menjadi kendala:

1. Tingginya prevalensi penyakit tidak menular
2. Perilaku hidup tidak sehat (merokok, kurang aktivitas fisik)
3. Akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil
4. Keterbatasan SDM kesehatan di beberapa fasilitas pelayanan

Dalam rangka meningkatkan capaian UHH, Dinas Kesehatan melakukan langkah- langkah sebagai berikut:

- Penguatan program deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular.
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan lansia.
- Optimalisasi kegiatan promotif dan preventif berbasis masyarakat.
- Penguatan sistem rujukan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- Kolaborasi lintas sektor dalam perbaikan sanitasi dan

lingkungan sehat.

Secara umum, capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif namun masih memerlukan penguatan intervensi program kesehatan secara komprehensif. Fokus peningkatan diarahkan pada pengendalian penyakit tidak menular, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Pasangkayu

f. Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya

Ukuran proporsi tenaga kesehatan yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan (diklat, workshop, bimtek, sertifikasi, pelatihan teknis medis/non medis) dibandingkan dengan total SDM kesehatan yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi dalam satu tahun, Indikator ini menggambarkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Persentase SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025 mencapai 90 % dari target 95%, dengan capaian sebesar 94,73%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kapasitas SDM telah berjalan baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Faktor Pendorong Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya :

- Ketersediaan anggaran pelatihan
- Dukungan kebijakan pimpinan
- Kerja sama dengan institusi pelatihan
- Program prioritas nasional (misalnya peningkatan

kompetensi pelayanan primer)

Faktor Penghambat Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan

Kompetensinya:

- Keterbatasan anggaran
- Beban kerja tinggi sehingga sulit meninggalkan tugas
- Distribusi tenaga kesehatan tidak merata
- Kuota pelatihan terbatas

G. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

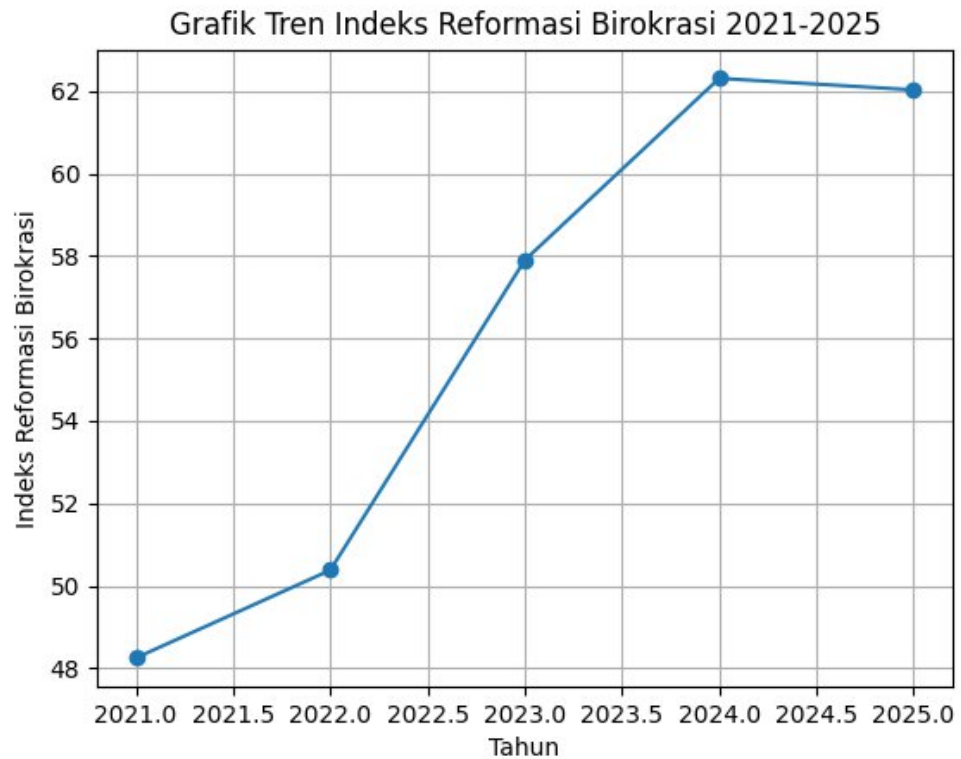
Indeks pelayanan publik Kabupaten Pasangkayu dari tahun 2024 ke 2025 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Pemerintah Daerah tidak melaksanakan evaluasi mandiri, yang seharusnya minimal 25% dari jumlah unit pelayanan publik
2. Masih minimnya standar pelayanan yang dimiliki oleh setiap upp
3. Pelaksanaan SKM hanya dilaksanakan di beberapa UPP
4. Belum adanya website pada setiap UPP dan belum terhubung dengan sipn
5. Komitmen pimpinan serta pengetahuan dalam hal pelayanan publik masih minim

H. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Pasangkayu terlaksana dengan cukup baik yaitu pada tahun 2025 total skor 62,03 dengan target 63 maka capaian indeks reformasi birokrasi sebesar 98,47%.

Dalam beberapa tahun terakhir tren kenaikan nilai reformasi birokrasi mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini disebabkan oleh kinerja dari seluruh stakeholder untuk meningkatkan indikator yang menjadi penilai reformasi birokrasi. Tren ini dapat dilihat dalam tabel:



Target jangka menengah reformasi birokrasi pada periode akhir yaitu 63, nilai ini sudah sangat mendekati dengan capaian Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2025. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maka Kabupaten Pasangkayu masih dibawah satu tingkat, beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi:

1. Membangun kerjasama tim yang lebih solid termasuk penguatan peran Inspektorat dan BAPPERIDA
2. Penguatan komitmen pimpinan
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Perbaikan SAKIP

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2025, memuat dokumen kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu yang tercermin dalam gambaran pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpatokan pada target-target yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka tergambar capaian kinerja organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2025.

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu yang kemudian diturunkan ke dalam 13 (tiga belas) sasaran strategis, maka diketahui bahwa pencapaian sasaran strategis tersebut rata-rata mengalami peningkatan yang baik.

Sebagai bentuk akuntabilitas, maka gambaran kinerja tahun 2025 ini disajikan dalam urutan sistematika yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian dilaporkan kepada instansi berwenang atau terkait, maupun kepada publik yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, tentunya LKjIP ini tidak bisa menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu secara utuh. Untuk keperluan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, maka diperlukan dokumen pelengkap seperti hasil evaluasi kinerja, LHP, maupun dokumen akuntabilitas organisasi lainnya.

Demikian LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.